

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Rabu 12 Februari 2025
Wilayah	Kabupaten Luwu



DAK Fisik Rp0 Efek Pemangkasan

DAK Fisik Rp0 Efek Pemangkasan

BELUPA, FAJAR—Efisiensi APBN berdampak ke daerah. Pembangunan infrastruktur yang dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum Pencanaan Ruang (PUPR) Luwu terhambat.

Pemangkasan anggaran ikut menyasar pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, serta irigasi yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik. Akibatnya, sulit ada pembangunan fisik tahun ini.

Pemangkasan ini merupakan dampak dari efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Ta-

hun 2025 yang ditetapkan pada 3 Februari 2025.

"DAK kita tahun ini dinolkan," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu, Sulaiman kepada FAJAR, Selasa, 11 Februari 2025.

Padahal, dana alokasi khusus semula dialokasikan ke Kabupaten Luwu mencapai Rp48 miliar. Meski demikian, anggaran pembangunan tetap masih ada. Namun, memang ada yang dibatalkan, termasuk khusus DAK infrastruktur di Dinas PUPR.

Mantan Kepala BKPSDM ini menyebut, bukan berarti tidak ada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu. "Masih tetap ada. Hanya di Dinas PUPR yang tidak

ada," kata Sulaiman.

Kepala Dinas PUPR Luwu Ihsan Asaad mengatakan telah mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan. Anggaran infrastruktur telah dinolkan. "Kalau di Dinas PU, nilai DAK kita Rp48 miliar," katanya.

Pemotongan ini sesuai surat yang diterima dari Kemenkeu. Menurutnya, DAU juga ikut pemotongan. Sementara anggaran DAU sebanyak Rp49 miliar. Artinya total dana yang dipotong akibat penghematan sebanyak Rp97,4 miliar. Itu sesuai informasi bidang anggaran.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Luwu Alamsyah mengatakan kebijakan pusat ini telah dikeluarkan. "Tapi kami ma-

sih menunggu surat edaran Mendagri untuk langkah-langkah yang akan diambil oleh daerah," katanya.

Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali Baso Hidayat mengatakan yang pastinya dewan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah harus tunduk dan patuh terhadap Inpres Nomor 1.

"Surat Kemenkeu itu, kan, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1. Ini terkait efisiensi anggaran kami mendukung pelaksanaan," kata Gazali.

Dia berharap langkah efisiensi anggaran ini dapat dilakukan secara adil dan tidak menghambat program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. **(shd/ZUK)**